

BAB II

DINAMIKA MEDIASI INTERNASIONAL UNI EROPA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang berbagai dinamika mediasi internasional yang melibatkan Uni Eropa sebagai mediator. Mediasi dan dialog yang dilakukan Uni Eropa tidak terlepas dari sejarah panjang terbentuknya integrasi kawasan Uni Eropa dengan dasar yang kuat untuk mencegah, mengakhiri konflik dan mengedepankan perdamaian internasional. Keterlibatan Uni Eropa dalam menjadi pihak ketiga suatu konflik terjadi pada berbagai kawasan regional, mulai dari pendekatan yang dilakukan Uni Eropa untuk memediasi konflik baik atas inisiatif Uni Eropa sendiri, atau terdapat permintaan akan keterlibatan Uni Eropa dalam memediasi konflik, serta penolakan terhadap keterlibatan Uni Eropa dalam memediasi konflik dengan kata lain pihak yang berkonflik tidak ingin ada pihak ketiga dalam konflik internal mereka yang mana mereka menganggap pihak ketiga memiliki kepentingan atas keterlibatannya dalam memediasi konflik.

2.1 Uni Eropa, stabilitas kawasan dan integrasi

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dari sejarah terbentuk dan berkembangnya sebuah negara, saling berebut kekuasaan dengan alasan kebangsaan, wilayah, agama dan sebagainya. Eropa merupakan salah satu contoh panggung konflik antar negara pada beberapa abad lalu sebelum terintegrasi satu sama lain seperti saat

ini. Victor Hugo seorang penulis pernah memimpin kongres perdamaian yang diadakan di Perancis pada tahun 1849, dimana kongres yang dihadiri oleh 2000 orang tersebut dapat kita ingat sampai saat ini tentang apa yang di katakan oleh Hugo mengenai perdamaian dan prediksi mengenai integrasi kawasan Eropa.

*“ A day will come when from your hand also the arms you have grasped will fall. A day will come when war will appear as absurd, and be as impossible, between Paris and London, Between St. Pettersbug and Berlin, Between Vienna and Turin, as it would be now between Rouen and Amiens, between Boston and Philadelphia. A day will come when you France, Russia, Italia, England, Germany, all of you, nations of the continents, will, without loosing your distinctive qualities and your glorious individuality, be blended into a superior unity and constitute an European faternity just as Normandy, Brittany, burgundy, Loraine, Alsace, Have been blended into France. A day will come when the only battle-field will be the market open to commerce and the mind opening to the new ideas. A day will come when bullets and Bomb-Shells will be replaced by votes, by the universal suffrage of nations, by the venerable arbitration of a great sovereign senate, which will be to Europe what the parliament is to England, What the diet is to Germany, What the Legislative Assembly is to France”.*¹

Berdasarkan apa yang di katakan Hugo mengenai keinginan terciptanya integritas di kawasan Eropa yang notabennya beliau merupakan seorang sastrawan yang memiliki pandangan lebih terhadap perdamaian dari pada konflik bersenjata. Latar belakang integritas yang diungkapkan Hugo pada awalnya mengenai integritas di wilayah perancis bahwa wilayah seperti Normandy, Brittany, Burgundy, Loraine dimana ketika memiliki keinginan yang kuat untuk bersatu maka akan menciptakan wilayah Integritas di Perancis. Pandangan mengenai integritas di wilayah Perancis tersebut kemudian di perluas ke dalam kawasan Eropa dimana panggung konflik sering terjadi. Jika

¹ Victor Hugo, 1849, Report of the Proceedings of the Second General Peace Congress held In Paris, Peace Committee, London diakses dalam http://davidmhart.com/liberty/WarPeace/Books/Congress/SecondPeaceCongressParis_1849.pdf pada Rabu, 29 Novemmberr 2017 pukul 00.00 wib

negara-negara tersebut bersatu seperti Perancis, Italia, Jerman, Inggris maka akan membentuk kesatuan yang sangat kuat tanpa masing-masing negara tersebut kehilangan kapasitas mereka untuk maju, yang terjadi justru malah semakin berkembang dengan persatuan tersebut.

Prediksi dan pandangan Hugo mengenai bersatunya Eropa di mulai dengan membangun pasar bersama, menghilangkan konflik bersenjata dan menggantinya dengan *voting*, musyawarah, dan dialog untuk membentuk kesepakatan bersama akhirnya terealisasi. Satu abad setelah kongres tersebut tepatnya setelah perang dunia II berakhir, cikal bakal Uni Eropa mulai terbentuk ketika terdapat keinginan kuat untuk memastikan tidak ada konflik lagi antar negara Eropa seperti Jerman dan Perancis tidak lagi terlibat dalam peperangan satu sama lain, mengingat pada perang dunia I dan perang dunia II kedua negara tersebut terlibat dan memiliki sejarah panjang konflik yang menjadi dasar persatuan untuk perdamaian.²

Dimulai dari penyatuan negara-negara Eropa oleh Komunitas Batubara dan Baja Eropa secara ekonomi, politik untuk menjamin perdamaian abadi, enam negara awal yang tergabung dalam komunitas tersebut adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Kondisi tersebut memimpin pada Perjanjian Roma pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1957.³ Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa bersamaan dengan pembentukan Komunitas Energi Atom Eropa (EURATOM) yang mana komunitas ini mengatur dan berbicara mengenai pemanfaatan teknologi atom. Para penggagas kebijakan memandang bahwa kontrol

² Will James, 2006, *History of The European Union*, CIVITAS, dalam <http://www.civitas.org.uk/content/files/OS.3.History.pdf> diakses pada Rabu, 29 November 2017 pukul 03.00 wib

³ Lihat dalam *The History of The European Union*, dalam https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en diakses pada Rabu, 29 November 2017 pukul 03.40 wib

terhadap energi merupakan kunci akan kestabilan politik dan perkembangan industry hal ini di karenakan bahwa energy tersebut akan berguna di masa yang akan datang baik batubara maupun atom.⁴

Terbentuknya komunitas tersebut menekan dan menghilangkan konflik satu sama lain dan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan, hal ini di karenakan telah dilakukan kontrol bersama akan energy mulai dari batubara, baja dan atom yang notabennya banyak digunakan sebagai material untuk berperang. Jika hal tersebut tidak dalam kontrol bersama maka apa yang mereka upayakan dengan perekonomian bersama akan menjadi sia-sia. Jika terjadi konflik, maka perekonomian tidak akan tumbuh justru yang terjadi malah sebaliknya. Cara tersebut bisa dianggap berhasil mengingat terdapat pertumbuhan ekonomi setelah berjalannya komunitas tersebut dan bergabungnya negara-negara Eropa lainnya secara bertahap membuat Komunitas semakin berkembang dan solid di kawasan Eropa.⁵

Hubungan negara Di Eropa pasca terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa semakin jauh dari kata konflik, persatuan ekonomi membuat integrasi dan kestabilan di dalam kawasan Eropa dimana hubungan antar negara mulai tidak mengenal batasan-batasan, hal ini di tandai dengan perjanjian Maastricht pasca perang dingin tahun 1992 yang mana perjanjian ini membentuk Uni Eropa dimana masyarakat yang tergabung dalam Uni Eropa bebas melintasi negara-negara anggota lainnya tanpa menggunakan paspor dan mendorong

⁴ Lihat dalam Luca Guzzeti, 1995, A brief History of European Union Research Policy, European Commission : Science Research Development, Brussels, hal 1

⁵ The history of European union, ibid

penggunaan mata uang tunggal Euro dalam Uni Eropa.⁶ Bersamaan dengan hal tersebut pada perjanjian Maastricht Masyarakat Ekonomi Eropa di ubah nama menjadi Masyarakat Eropa, yang mana pada perjanjian tersebut merubah beberapa regulasi yang terdapat pada Perjanjian Roma yang membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa.⁷

Pada tahun 2009 mulai di berlakukan perjanjian Lisbon yang terjadi pada tahun 2007. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang memperbarui perjanjian sebelumnya dalam Uni Eropa, dimana perjanjian ini meleburkan semua komunitas menjadi satu kedalam Union sehingga seluruh teks Community dirubah menjadi Union.⁸ Perjanjian Lisbon mengukuhkan kekuatan Uni Eropa untuk bertindak di bidang hak asasi manusia, peradilan, kebijakan luar negeri, dan menekankan integrasi kawasan yang harus di kedepankan serta mempercepat perluasan integrasi kawasan untuk kepentingan masa yang akan datang, yang mana termasuk didalamnya menekankan bahwa warga negara anggota merupakan warga negara Uni Eropa.⁹

2.2 Uni Eropa dan Mediasi

Perjanjian-demi perjanjian dilakukan oleh Uni Eropa demi masa depan kawasan yang terintegrasi dengan baik dan mengedepankan perdamaian abadi. Perjalanan Uni Eropa menjadi kawasan yang

⁶ Europe without Frontiers, dalam https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 07.40 wib

⁷ Lihat dalam Official Journal of the European Communities, 1992, Treaty on European Union: (92/C 191/01), https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_en.pdf diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 07.45 wib

⁸ The Treaty of Lisbon, dalam http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.5.pdf diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 08.45 wib

⁹ Pippa Knot, 2007, Treaty of Lisbon, CIVITAS, dalam <http://www.civitas.org.uk/content/files/TR.6.Constitution-Lisbon-Treaty.pdf> diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 11.11 wib

terintegrasi dengan baik dan perekonomian yang kuat membuat Uni Eropa menjadi contoh persatuan kawasan oleh regional lainnya. Uni Eropa mulai menjadi aktor internasional yang mengedepankan, demokrasi, stabilitas keamanan, ekonomi dan kawasa serta integrasi. Sebagai aktor dalam dunia international Uni Eropa mulai mengkampanyekan perdamaian dan menghilangkan konflik maka dari itu Uni Eropa sering terlibat dalam menjadi pihak ketiga dalam konflik atau permasalahan yang terjadi di antara negara yang berdaulat.

Uni Eropa sebagai aktor internasional perlu memperhatikan tiga prinsip dasar yang bisa memperkuat fungsi dan peran Uni Eropa untuk perdamaian yang berkelanjutan yaitu :

1. *Human Security*, fungsi ini mengedepankan kepedulian terhadap kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan penderitaan pada manusia yang disebabkan oleh konflik kekerasan serta kegagalan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. *Developmennt*, fungsi ini memastikan keefektifan bantuan yang ditujukan untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan biaya dan resiko yang tinggi berkaitan dengan donor yang telah meninggalkan negara dalam waktu yang lama sehingga tidak terjadi pembangunan pada negara tersebut.
3. *Global Security*, fungsi ini memastikan keamanan global terkait dengan bahaya mengisolasi sebuah negara dan peningkatan ekstremisme dan terorisme pada negara gagal. Mengisolasi sebuah negara yang di anggap membahayakan justru dapat meningkatkan dan memberikan rasa tidak aman

karena terdapat gejolak yang dipicu dari proses isolasi tersebut.¹⁰

Perdamaian yang berkelanjutan dalam dunia internasional masuk dalam rencana jangka panjang Uni Eropa untuk menciptakan kestabilan keamanan dunia yang terbebas dari konflik yang kemudian proyek stabilitas dapat mendukung integrasi kawasan Uni Eropa dan mengembangkan jaringan perdagangan ke seluruh dunia. seperti keberhasilan yang terjadi dalam menciptakan kestabilan dalam kawasan regional Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya yang notabennya negara-negara tersebut bertikai satu sama lain sebelum terintegrasi seperti saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu cara yang digunakan oleh Uni Eropa adalah menggunakan mediasi dan dialog sebagai alat penyelesaian konflik karena jika menggunakan kekuatan material justru akan memperkeruh masalah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dapat berimbas kepada Human Security, Development dan Global Security.

Pada tahun 2009 Uni Eropa mengeluarkan konsep tentang penguatan mediasi dan dialog, Menurut Sekretariat Umum Dewan Uni Eropa Mediasi adalah sebuah cara untuk membantu negosiasi antara pihak yang berkonflik dan mengubah konflik melalui dukungan pihak ketiga yang dapat di terima, dengan tujuan memungkinkan pihak yang berkonflik tersebut mencapai kesepakatan yang mereka anggap memuaskan dan bersedia untuk di implementasikan.¹¹ Dalam konsep mediasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terdapat lima tipe keterlibatan Uni Eropa dalam mediasi:

¹⁰ Antje Herrberg, 2012, *International Peace Mediation: A new Crossroads for the European Union*, DCAF, Belgium, hal 7

¹¹ Council of The European Union, *Ibid* hal.2-3

1. Uni Eropa sebagai Mediator : Uni Eropa dapat menjadi mediator secara langsung pada keterlibatannya dalam mediasi, atau terlibat secara tidak langsung dengan bekerja sama dengan aktor lain.
2. Mempromosikan Mediasi : Uni Eropa bergerak sebagai promotor mediasi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Uni Eropa dalam keterlibatannya pada proyek perdamaian untuk hak asasi manusia.
3. Memanfaatkan Mediasi : dengan bobot politik dan keuangan yang dimiliki oleh Uni Eropa, Uni Eropa dapat menjadi pihak yang tepat untuk memberikan pengaruh diplomatik yang mendukung kebijakan dan tindak lanjut dari instrument manajemen
4. Mendukung Mediasi : dalam mendukung mediasi Uni Eropa bergerak dengan memfasilitasi proses mediasi yang efektif yang dipimpin oleh aktor lain melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dukungan logistik dan penyediaan keahlian kepada mediator dan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Pendanaan mediasi : Uni Eropa memberikan dukungan finansial untuk proses mediasi formal, informal bahkan sampai ke akar proses mediasi untuk mencapai keberhasilan mediasi tersebut.¹²

Berdasarkan tipe keterlibatan Uni Eropa dalam memediasi suatu permasalahan hal itu termasuk dalam alat kebijakan untuk memperkuat mediasi. Ketika tidak berperan sebagai mediator dalam mediasi konflik

¹² Ibid, hal 6

Uni Eropa menempatkan diri dalam beberapa cara demi terciptanya kepentingan perdamaian yang telah di upayakan, dimana Perjalanan mediasi dan dialog Uni Eropa banyak menemui keberhasilan sehingga Uni Eropa merupakan aktor yang paling dicari dan diminta untuk menjadi pihak ketiga dalam konflik yang sedang berlangsung.¹³

Mediasi dan dialog dapat menjadi sesuatu yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Jika kaum realis beranggapan bahwa menggunakan kekuatan material adalah cara yang tepat untuk mempertahankan diri dan menggapai kekuasaan hal itu bertolak belakang dengan pandangan konstruktivis yang lebih mengutamakan penanaman ide yang dapat di terima bersama dan menemui jalan tengah seperti apa yang di katakan wendt bahwa penentuan struktur dasar pada masyarakat berdasarkan kekuatan ideasional yang dapat diterima bersama dibandingkan dengan kekuatan material.¹⁴ Berdasarkan pandangan tersebut maka mediasi dan dialog lebih mengarah kepada konstruktivis karena pihak ketiga berusaha menanamkan ide untuk di terima pihak yang bertikai dan jika berhasil maka konflik tersebut menemui jalan tengah sesuai dengan kesepakatan bersama dari pada harus menggunakan kekuatan material.

2.3 Dinamika Mediasi internasional Uni Eropa

Uni Eropa mempunyai segala kapasitas dalam menjadi mediator pada permasalahan internasional. Jauh sebelum diluncurkannya konsep penguatan mediasi dan dialog pada tahun 2009 oleh Uni Eropa bersamaan dengan diberlakukannya perjanjian Lisbon, Uni Eropa telah banyak memainkan peran sebagai mediator konflik yang terjadi dalam

¹³ Ibid, hal 4

¹⁴ Alexander wendt, 1999, *Social Theory of international Politics*, Cambridge University Press, New York , hal.1

dunia Internasional baik secara langsung maupun tidak. Dibentuknya perjanjian Lisbon tersebut bersamaan dengan pembentukan EEAS yang merupakan layanan diplomatik Uni Eropa. Layanan diplomatik tersebut bertujuan membantu pimpinan yang mengurus urusan luar negeri dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HR) dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa.¹⁵ EEAS meskipun dibentuk pada tahun 2009 namun baru beroperasi satu tahun berikutnya.¹⁶

Sebelum dibentuknya EEAS dalam melakukan urusan luar negeri terdapat divisi tersendiri yang kemudian dilebur menjadi satu menjadi HR. Peran EEAS dalam hubungan luar negeri lebih efisien dibandingkan sebelum perjanjian Lisbon dimana ketika menjadi mediator Uni Eropa sering menemui hambatan dalam mediasi konflik dalam beberapa kasus meskipun pada kenyataannya Uni Eropa banyak menemui jalan sukses menjadi mediator konflik. Posisi Uni Eropa dalam memainkan peran mediasi konflik memperhatikan beberapa aspek, Wilayah dalam memediasi konflik juga menjadi salah satu faktor dalam kelancaran mediasi konflik. Misalnya dengan melihat pihak yang bertikai dan hubungannya dengan negara-negara Uni Eropa yang mana pihak tersebut memiliki kepentingan dan ideology yang berbeda dengan negara-negara barat. atau rekam jejak hubungan dengan negara yang sedang di mediasi.

¹⁵ EEAS, dalam https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-european-external-action-service-eeas_en diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 13.31 wib

¹⁶ Andrew Brettman, Ashton names EU foreign-service priorities at low-key launch event dalam <https://euobserver.com/institutional/31413> diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 15.31 wib

Dalam memediasi konflik Permasalahan yang sering ditemui oleh Uni Eropa adalah mengenai pemisahan diri dari negara Induk karena berbagai faktor, mulai dari faktor sejarah, geopolitik, etnik, ekonomi dan ketidakpuasan terhadap negara induk yang dirasakan oleh gerakan separatis sehingga ingin memisahkan diri menjadi negara yang independen. Pada beberapa kasus yang di mediasi oleh Uni Eropa mengenai konflik Separatisme, Uni Eropa mendukung pemisahan diri tersebut dimana pada kasus lainnya Uni Eropa menekankan Integrasi dimana hal tersebut terkadang membuat tensi semakin tinggi antara dua pihak yang bertikai. Dalam regional Asia Tenggara Uni Eropa telah memediasi beberapa konflik yang terjadi di Indonesia(Aceh), Myanmar, dan Filipina (Mindanao), dalam Wilayah Asia lainnya Uni Eropa memainkan peran dalam konflik yang terjadi antara Israel-Palestina, Konflik di Nepal, Sri lanka dan Yaman sedangkan pada wilayah Eropa sendiri Uni Eropa berperan memediasi konflik yang terjadi antara Serbia-Kosovo, Georgia-Rusia yang mana tidak termasuk dalam anggota Uni Eropa.¹⁷Konflik tersebut terletak pada wilayah yang berbeda sehingga strategi yang di gunakan Uni Eropa juga berbeda.

2.3.1. Mediasi di ASEAN

Konflik etnis, agama dan kekerasan pemerintahan Militer telah melanda Myanmar selama bertahun-tahun yang menyebabkan banyaknya korban jiwa.Konflik etnis dan agama tersebut sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dari inggris pada thaun 1948.Dibawah kepemimpinan militer banyak terjadi kekerasan yang diakibatkan tuntutan ekonomi yang lebih besar sehingga terjadi perlawanan yang

¹⁷ Andrew Sheriff, *ibid* hal V

menimbulkan konflik.¹⁸ Setelah polemik tersebut, pada tahun 2011 terjadi gencatan senjata dan pembicaraan mengenai pemilihan dalam parlemen, dimana Myanmar mulai masuk dan merubah ke arah yang lebih demokratis yang mana pemilihan tersebut menjadi penting untuk masa depan Myanmar. Uni Eropa berada dalam garda terdepan dalam menyambut wacana baik mengenai perubahan arus politik tersebut.¹⁹

Uni Eropa sempat mengembargo Myanmar dari segala lini akibat kekerasan di Myanmar pada Tahun 1990 , namun bantuan kemanusiaan tetap di berikan Uni Eropa meskipun menghentikan hubungan sementara.²⁰ Ketika Uni Eropa menyambut baik reformasi politik tersebut, Uni Eropa mulai membatalkan embargo-embargo yang di lakukan terhadap Myanmar kecuali Embargo senjata.²¹ Hal tersebut dilakukan Uni Eropa untuk menghindari potensi munculnya kembali konflik akibat kepentingan yang berbeda. Untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan perdamaian bisa tercapai Uni Eropa memberi solusi untuk kebaikan para pihak yang bertikai dengan membebaskan tahanan politik dan pemimpin oposisi dalam hal ini termasuk Aung San Suu Kyi, sehingga pemilihan dapat berjalan secara demokratis. Jika tidak melepaskan para tahanan maka rencana pemilu dianggap tidak serius oleh Uni Eropa dan sanksi Embargo akan terus berlanjut.²²

Posisi Uni Eropa dalam memediasi konflik di Myanmar adalah memastikan proses transformasi politik dari junta militer ke Sipil

¹⁸ Guy Banim, 2014, The EU in Myanmar: Preventive Diplomacy in Action, EU Institute for Security Studies, 2014. | QN-AK-14-029-2A-N, hal 1

¹⁹ Ibid, hal 2

²⁰ Lihat dalam European Commission, The EU's relations with Burma / Myanmar dalam http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/dase20050419_003/dase20050419_003en.pdf diakses

²¹ Guy Banim, Ibid hal 2

²² Christopher O'Hara, 2010, The Myanmar 2010 Elections: A European Perspective, ISDP, Singapore, hal 26

berjalan sesuai asas demokrasi dan perdamaian di wilayah tersebut. Uni Eropa juga membangun kerjasama dengan lingkungan internasional seperti PBB, Jepang, Australia, Inggris, Swiss, dan Bank Dunia untuk memberikan dukungan politik untuk perdamaian yang komprehensif di Myanmar. Selain itu Uni Eropa menjadi donator utama terhadap proses perdamaian di Myanmar tidak terlepas dari segi kemanusiaan. Pendanaan rutin dilakukan Uni Eropa untuk memastikan perdamaian terealisasi. Kendala yang dihadapi oleh Uni Eropa adalah dalam lingkungan internal kurangnya komando institusi yang mewakili Uni Eropa dalam memediasi konflik tersebut yang berpotensi menghambat rencana Uni Eropa dalam jangka panjang.²³ Hambatan tersebut dikarenakan EEAS yang baru saja dibentuk pasca perjanjian Lisbon sehingga masih ada cela dan kurangnya komunikasi di lingkungan Internal Uni Eropa.

Dalam regional Asia Tenggara lainnya Uni Eropa juga turut berperan dalam proses mediasi permasalahan konflik yang Terjadi antara pemerintah Indonesia dan kaum Separatis di Aceh (GAM). Terlibatnya Uni Eropa dalam konflik tersebut Pada tahun 2005 dengan memonitor perdamaian di wilayah Aceh. Pada awalnya Crisis Management Initiative (CMI) sebagai organisasi internasional non-pemerintah(INGO's) menjadi mediator konflik tersebut. dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Marthi Athisari yang pada akhirnya menimbulkan kesepakatan damai antara kedua pihak. Setelah berakhirnya peran CMI dengan ditandatanganinya kesepakatan damai, Uni Eropa mengambil alih dan melanjutkan peran CMI. Uni Eropa mengadakan Aceh Monitoring Mission(AMM) yang memastikan perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh

²³ Andrew Sheriff Ibid , hal 17

Merdeka (GAM) berhasil dan terpelihara untuk jangka panjang bukan hanya sekedar perjanjian. Peluncuran AMM oleh Uni Eropa dengan menjalin kerja sama dengan ASEAN.²⁴ Dalam proses tersebut EEAS belum di bentuk yang mana hal ini jauh terjadi sebelum perjanjian Lisbon institusi yang menangani masih CFSP dan ESDP sebelum melebur menjadi High Representative. Tidak hanya memantau perdamaian melalui AMM, Uni Eropa juga mengeluarkan dana besar untuk menjaga perdamaian tersebut, diawali dengan bantuan kemanusiaan pasca terjadi bencana alam tsunami pada tahun 2004, Uni Eropa mengeluarkan 1.500.000 Euro. Uni Eropa menganggap bantuan kemanusiaan dapat dengan mengucurkan dana dapat menghambat terjadinya konflik yang mana pada tahun 2005 Uni Eropa menambah bantuan kemanusiaan sebesar 2.300.000 Euro untuk memfasilitasi proses perdamaian.

Menurut Antje Herberg, beberapa kelompok Di Brussel menganggap apa yang dilakukan oleh uni Eropa adalah tindakan yang sangat beresiko dengan pandangan bah Uni Eropa telah memainkan bisnis politik di wilayah tersebut padahaljika dilihat dari kepentingan politiknya, Uni Eropa tidak memiliki kepentingan Politik di wilayah tersebut atau jika ada sangat kecil.²⁵ Berdasarkan pandangan tersebut Uni Eropa berani mengambil resiko sebagai aktor perdamaian meskipun wilayah yang di mediasi jauh dari kepentingan politik Uni Eropa. Hal tersebut dapat member pembuktian bahwa Uni Eropa dapat berperan untuk menjaga perdamaian dan mengedepankan asas demokrasi. Pada sisi lainnya Bencana alam membantu memperkecil resiko Uni Eropa terhadap keberhasilan dalam memediasi konflik

²⁴ Antje Herberg, *The Brussels 'Backstage' of the Aceh peace process* Ibid

²⁵ Ibid hal 34

tersebut, karena dengan bencana alam yang terjadi pada saat itu membuat semua pihak sadar bahwa konflik akan memperburuk keadaan baik dalam segi kemanusiaan, pembangunan dan lainnya, maka saling membantu demi masa depan merupakan solusi yang terbaik pada saat itu.

Promosi mengenai menjaga perdamaian terus dilakukan oleh Uni Eropa dengan aktif terlibat dalam mediasi konflik. Dalam Regional ASEAN lainnya Uni Eropa terlibat pada konflik yang terjadi di Mindanao, Filipina antara Pemerintah dan kelompok separatis Bangsamoro dan Pemerintah Filipina. Konflik di Mindanao telah terjadi sejak tahun 1969 dimana Bangsamoro menganggap bahwa mereka bukan merupakan bagian dari Filipina. Agama juga menjadi salah satu faktor pemberontakan tersebut yang mana Bangsamoro beragama Islam yang kemudian pemberontakan tersebut dipimpin oleh akdemisi Nur Misuari dan membentuk Moro National Liberation Front (MNLF). Seiring berjalannya waktu MNLF pecah dengan munculnya Moro Islamic Liberation Front (MILF) dimana kelompok MILF bertindak lebih Ekstrem mengenai kekerasan yang membuat mereka dihubungkan dengan organisasi teroris dunia seperti Al-Qaeda, dan ISIS.²⁶

Hubungan yang dibangun Uni Eropa dengan Pemerintah Filipina dengan mempromosikan perdamaian dan melakukan aksi kemanusiaan telah berlangsung sejak tahun 1990, jika dibandingkan dengan keterlibatan Uni Eropa pada konflik yang ada Di Regional

²⁶ Hanna Azarya Samosir, siapa yang bertarung di selatan Filipina, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160112151747-106-103767/siapa-yang-bertarung-di-selatan-filipina/> diakses pada Senin, 11 Desember 2017 pukul 00.10 wib

ASEAN yang terjadi di Indonesia dan Myanmar Uni Eropa sudah terlibat terlebih dahulu dengan aksi perdamaian di Filipina dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Dengan memastikan aksi tersebut untuk jangka panjang Uni Eropa aktif memberikan bantuan dana untuk tetap menjaga kelanjutan Hubungan dengan Pemerintahan Filipina pada aksi tersebut.²⁷

Berdasarkan aksi yang dilakukan Uni Eropa di wilayah tersebut, Uni Eropa menjadi aktor yang memiliki kapasitas lebih dibandingkan aktor lain dalam mediasi konflik dan dialog untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Filipina. Pada tahun 2008 Uni Eropa memfasilitasi dialog antara Pemerintah Filipina dan pihak yang berkonflik. Uni Eropa menggandeng aktor-aktor lain termasuk LSM dan mendanai mereka untuk mewujudkan proses tersebut. berbagai macam pendekatan dari tahun ke tahun dilakukan sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk meredam konflik. Upaya tersebut bisa di anggap berhasil dengan intensitas konflik yang turun secara signifikan meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang sedang di upayakan melalui proyek perdamaian. Tidak berhenti disitu, untuk memastikan perdamaian jangka panjang Uni Eropa mengucurkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar dari dana yang sudah dikeluarkan pada proyek sebelumnya di Filipina sebesar 325.000.000 Euro untuk jangka waktu dari tahun 2014-2020 demi mempertahankan perdamaian yang sudah diupayakan.²⁸ Jika kita melihat apa yang telah di upayakan oleh Uni Eropa dalam perdamaian di Filipina, Uni Eropa

²⁷ EEAS, The European Union a Partner for Peace and Development In Mindanao dalam https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_partnerforpeace.pdf diakses pada Senin, 11 Desember 2017 pukul 01.16 wib

²⁸ ibid

muncul sebagai aktor yang mampu mengelola konflik dan memanfaatkan celah yang terdapat pada konflik .

Rekam jejak mediasi dan dialog Uni Eropa di regional ASEAN dapat dikatakan baik. Pada prosesnya keberhasilan mediasi konflik Uni Eropa baik di Indonesia, Myanmar, maupun Filipina, faktor yang dominan terhadap proses tersebut adalah bantuan dalam pendanaan. Keaktifan Uni Eropa dalam memberikan bantuan dana dan menggandeng pihak yang berkompeten memiliki pengaruh terhadap mempertahankan perdamaian dan kemanusiaan sehingga dapat memberikan pola pikir yang berbeda terhadap pihak yang bertikai. Faktor geopolitik dan kepentingan Uni Eropa yang tergolong minim menjadikan mediasi dan dialog konflik pada Regional ASEAN murni mempromosikan perdamaian sehingga bantuan dana oleh Uni Eropa bisa dianggap sebagai Investasi perdamaian.

2.3.2 Mediasi di Eropa

Melihat mediasi dan dialog Uni Eropa terhadap konflik yang terjadi di kawasan Eropa sikap Uni Eropa dalam menangani konflik masuk ke arah yang berbeda, hal ini meskipun perdamaian dan demokrasi menjadi tujuan utama dalam mediasi konflik namun unsur geopolitik, dan hubungan antar negara yang di tengah oleh Uni Eropa sebagai pihak ketiga turut menjadi faktor yang menentukan, apalagi jika konflik terjadi dalam wilayah Uni Eropa itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada konflik Kosovo, Georgia yang mana konflik tersebut menjadi lebih menantang bagi Uni Eropa untuk menempatkan posisinya sebagai mediator. Aspek resiko dan keuntungan yang juga besar perlu di pertimbangkan.

Konflik antara Serbia dan Kosovo di wilayah Balkan merupakan satu konflik yang kompleks dan melibatkan kekerasan. Konflik ini berdasarkan wilayah dimana Kosovo ingin memisahkan diri dari Serbia dengan berbagai alasan. Uni Eropa bergerak menjadi mediator untuk perdamaian di wilayah tersebut yang berujung pada kemerdekaan Kosovo. Hampir seluruh anggota Uni Eropa mengakui kemerdekaan tersebut kecuali lima negara yang mana merupakan kebijakan luar negeri masing masing negara tersebut. Uni Eropa tidak memiliki wewenang untuk mengakui kedaulatan negara dalam hal ini Uni Eropa hanya menjadi mediator. Pengakuan terhadap Kosovo di dorong oleh negara anggota sebagai kebijakan luar negerinya masing-masing.²⁹ Padahal jika kita melihat fenomena tersebut adalah fenomena disintegrasi yang namun aspek kekerasan menjadi salah satu faktor yang mengundang Uni Eropa terjun ke pada jalan perdamaian. Pada akhirnya Uni Eropa dapat memetakan konflik yang terjadi di Kosovo.

Mediasi dan dialog yang dilakukan oleh Uni Eropa di kawasan Eropa berpedoman juga pada hubungan dengan negara tetangga yang berada di sekitar kawasan. Meskipun tidak termasuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Uni Eropa berbeda ketika memediasi konflik di regional lainnya, karena faktor geopolitik juga dapat memberikan efek kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Sama halnya ketika menangani kasus Georgia ketika ada wilayahnya yang ingin memisahkan diri Uni Eropa berusaha untuk menjadi mediator agar wilayah tersebut tidak melepaskan diri. Peneliti memandang wilayah geopolitik Georgia menjadi salah satu penyebab

²⁹ Andrew Sherif , Ibid hal 14

Uni Eropa mendukung integrasi di satu kawasan dan mendukung di integrasi di kawasanlain. Georgia berbatasan dengan Rusia yang mendukung disintegrasi tersebut sedangkan Rusia dan Uni Eropa memiliki perbedaan Ideologi bisa di katakana ada faktor kepentingan dalam menyebarkan ideology masing-masing yang menyebabkan perbedaan proses pembuatan keputusan di setiap wilayah.

2.3.3 Mediasi di Asia

Mungkin hampir seluruh regional terdapat keterlibatan Uni Eropa dalam mediasi Konflik.Di Asia Uni Eropa terlibat dalam mediasi konflik di Nepal, Israael-Palestina, Sri Lanka. Seperti di Nepal hubungan antara Uni Eropa dan Nepal dibangun sejak tahun 1990-an. Dalam konflik Nepal yang terjadi di wilayah internal mereka antara partai Komunis dan Pemerintah Kerajaan Nepal. Konflik ini merupakan konfli yang panjang yang mana akar permasalahannya adalah ketika partai komunis menggunakan cara kekerasan untuk menggantikan kerajaan dengan sebuah pemerintahan republik sebelum akhirnya melakukan negosiasi gencatan senjata.³⁰pada tahun 2001 Uni Eropa terlibat untuk melakukan analisis konflik yang terjadi di Nepal dibawah komando komisi Eropa yang kemudian mengalokasikan dana selama 4 tahun mulai dari 2002-2006 sebesar kurang lebih 70.000.000 Euro.³¹Peran Uni Eropa di Nepal turut membantu dan mendukung transformasi politik dan pembangunan daerah Nepal. Uni eropa tidak bekerja sendirian melainkan bersama Instansi lain seperti PBB , namun dalam pendanaan nya Uni Eropa fokus kepada bantuan kemanusiaan

³⁰ Ibid, hal.18

³¹ Nepal Country Strategy Paper 2007-2013, dalam https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nepal-2007-2013_en.pdf diakses pada Kamis 14 Desember 2017 pukul 05.45

dan pengembangan daerah tersebut, bukan untuk mendukung komunis karena salah satu faktor Uni Eropa terlibat dalam konflik adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Dalam regional Asia lainnya Uni Eropa juga terlibat dalam mempromosikan perdamaian seperti yang di jelaskan di atas ketika memediasi konflik Israel Palestine, kemudian beberapa wilayah lainnya. Peneliti melihat bahwa keterlibatan Uni Eropa sebagai mediator selain mempromosikan perdamaian juga terdapat memiliki kepentingan, meskipun pada hakikatnya seorang mediator harus netral dalam memediasi konflik. Rekam jejak Uni Eropa dalam memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian ini menjadi salah satu faktor Uni Eropa dalam meraih Nobel Perdamaian atas kesuksesannya tersebut.³² dengan demikian dalam memediasi konflik Uni Eropa merupakan aktor yang paling dicari dan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi.

³² Uni Eropa Raih hadiah Nobel Perdamaian
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121012_nobel_perdamaian diakses pada Kamis 14 Desember 2017 pukul 05.55

